

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (*development function*), dan fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara sistematis dan komprehensif dalam waktu 5 (lima) tahun, telah disusun kebijakan Jangka Menengah Daerah yang merupakan landasan arah penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana RPJMD berfungsi sebagai :

1. Pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan (rencana strategis) SKPD menjadi Rencana Strategis SKPD.
2. Bahan utama penyusunan RKP.
3. Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas Kepala Daerah.

4. RPJMD Provinsi merupakan bahan masukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten / Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-2017 yang disingkat dengan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-2017 (sesuai dengan pasal 1 point 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang diselenggarakan berdasarkan Azas Umum Penyelenggaraan Negara.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau yang disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-2017 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan melaksanakan dan mengemban amanah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan ikut memenuhi tuntutan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diiringi keinginan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang strategis, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-2017.

Renstra SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-2017 memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun

sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan berpedoman kepada RPJMD Daerah dan bersifat indikatif.

Dalam era reformasi dan globalisasi ini, tuntutan masyarakat akan kinerja pelayanan dari pemerintah daerah semakin tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk bekerja profesional dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewujudkan *Good Governance*.

Berdasarkan penjelasan diatas, Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta perlu menyusun rencana yang lebih aplikatif dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dan memberikan arah dalam perencanaan, pelaksanaan khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategi 5 (lima) tahunan dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun. Adapun maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012 – 2017 secara lebih terperinci adalah sebagai berikut :

1. Sebagai dokumen yang menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke

dalam rencana yang lebih kongkrit dan implementatif yang menjadi acuan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang memberikan arah kebijakan serta pedoman dalam pelaksanaan tugas menuju suatu sistem kerja yang sistematis, terukur serta berkelanjutan.

2. Sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas di Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012 – 2017 adalah menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama 5 (lima) tahun melalui sumber pembiayaan APBD. Secara lebih terperinci tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012 - 2017 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang dirujuk setiap tahun dalam bentuk Rencana Kerja.
2. Menjabarkan dan menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Kebijakan dan Program prioritas RPJMD pada tingkat SKPD dalam hal ini Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin tercapai oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dengan berpedoman pada RPJP Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah atau dengan kata lain dari kegiatan penyusunan Renstra ini, berbagai permasalahan yang sedang dan akan dihadapi diharapkan dapat teratasi melalui pencermatan lingkungan strategis untuk selanjutnya disusun kedalam prioritas pembangunan daerah.
4. Memberikan gambaran pelayanan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, kinerja yang ada saat ini serta isu dan permasalahan strategis.
5. Memberikan gambaran strategi dan kebijakan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam kerangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam pembangunan daerah.

1.2.3 Sasaran

Sasaran penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012 – 2017 adalah :

1. Tersusunnya perencanaan strategis Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk 5 (lima) tahun kedepan yang berisi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta;

2. Mengidentifikasi potensi, kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan publik dan pemerintah provinsi di Kota Jakarta;
3. Menentukan Visi dan Misi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta;
4. Menentukan strategi, kebijakan, tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi;
5. Merumuskan program dan kegiatan dalam pelayanan publik dan pengembangan penanaman modal / investasi sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah;
6. Merumuskan mekanisme pengukuran dan evaluasi kinerja

1.3 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-2017 disusun atas 3 (tiga) dasar hukum penyusunan atau dasar landasan hukum, yaitu :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :

Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, serta memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;

- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4664);
- j. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;

- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 4 Seri E) ;

- p. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E) ;
- q. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Statistik serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- r. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2012-2017.

Yang mana perangkat-perangkat tersebut berfungsi sebagai instrumen dan pedoman utama bagi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

1.4.Sistematika Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-2017 disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab I berupa uraian yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kedudukan renstra SKPD dalam perencanaan daerah dan sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran Pelayanan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

Bab II berisi tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan kantor, sumber-sumber pembiayaan dan analisa lingkungan strategis, isu dan permasalahan strategis yang ada pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

BAB III : Isu- Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini menjelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; serta penentuan isu - isu strategis.

BAB IV : Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-2017; tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Perwakilan; strategi dan kebijakan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta .

BAB V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Pada bab ini menggambarkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-2017.

BAB VI : Indikator Kinerja Kantor Perwakilan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Pada bab ini menjelaskan indikator kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : Penutup

Bab VI terdiri dari kaidah pelaksanaan, program dan kegiatan transisi serta uraian penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA

2.1. Tugas dan Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

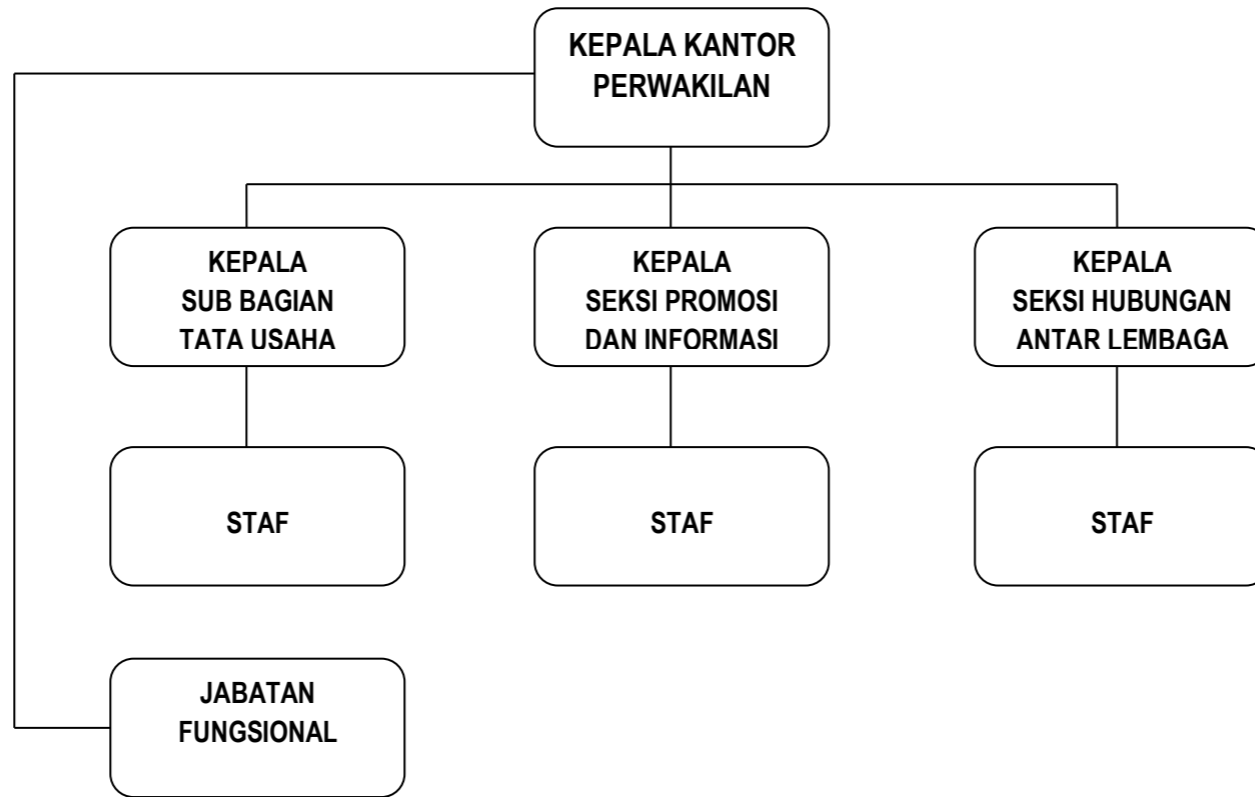
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Jakarta awalnya dikenal sebagai Kantor Penghubung di bentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang kemudian diperkuat oleh Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2003 tanggal 12 Januari 2003, yang selanjutnya mengalami perubahan nomenklatur menjadi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta. Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada dibawah dan bertanggung jawab ke pada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta (Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 75 Tahun 2008) (***gambar struktur terlampir***) adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Perwakilan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Promosi dan Informasi
- d. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERWAKILAN POVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI JAKARTA**



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013, Tugas Pokok dan Fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

2.1.1 Kepala Kantor

Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta mempunyai **tugas pokok** membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta mempunyai fungsi :

- a. Perumusun kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya ;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang hubungan antara lembaga, promosi serta informasi di Jakarta ;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.2 Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga kantor, perlengkapan, surat menyurat, protokuler, keuangan, kepegawaian, tata usaha serta hubungan masyarakat. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan urusan rencana dan program kerja kantor ;
- b. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan kebersihan kantor ;
- c. Menyiapkan laporan tahunan kantor ;
- d. Melaksanakan administrasi barang dan perlengkapan kantor ;
- e. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan kantor ;
- f. Melaksanakan administrasi kepegawaian ;
- g. Melaksanakan administrasi keuangan;
- h. Melaksanakan urusan keprotokolan ;

- i. Melaksanakan urusan kehumasan ;
- j. Melaksanakan administrasi perkantoran ;
- k. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data, dan bahan menurut ketentuan ;
- l. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan ;
- m. Melaksanakan pembinaan staf.

2.1.3 Seksi Promosi dan Informasi

Seksi Promosi dan Informasi mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan promosi dan informasi, memonitor dan memantau pelaksanaan kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah. Seksi Promosi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor .

Seksi Promosi dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan promosi dan informasi ;
- b. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan kegiatan promosi dan informasi pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- c. Menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis kegiatan promosi dan informasi ;
- d. Mengelola dan melaksanakan kegiatan-kegiatan seni budaya, pariwisata, pameran, promosi dan informasi di anjungan daerah TMII;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan kegiatan promosi dan informasi pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- f. Melaksanakan administrasi seksi promosi dan informasi ;
- g. Melaksanakan pembinaan staf ;
- h. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
- j.

2.1.4 Seksi Hubungan Antar Lembaga

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan dalam Hubungan Antar Lembaga, melakukan pembinaan organisasi masyarakat daerah Bangka Belitung di Jakarta dan sekitarnya serta memfasilitasi pelayanan Hubungan Antar Lembaga. Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan organisasi masyarakat daerah Bangka Belitung di Jakarta dan sekitarnya guna peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah Bangka Belitung ;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga baik antar lembaga pemerintah, swasta, maupun domestik untuk kelancaran hubungan kerja ;
- c. Menyiapkan pedoman yang berkaitan dengan kegiatan hubungan antar lembaga ;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kegiatan hubungan antar lembaga ;
- e. Membuat rencana dan program kerja seksi hubungan antar lembaga ;
- f. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan kegiatan ;
- g. Melaksanakan pembinaan organisasi masyarakat daerah Bangka Belitung di Jakarta dan sekitarnya dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- h. Melaksanakan administrasi seksi hubungan antar lembaga ;
- i. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data bahan menurut ketentuan yang berlaku ;
- j. Melaksanakan pembinaan staf ;
- k. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan ;

1. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.2 Sumber Daya Aparatur Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

A. Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya saat ini SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta didukung oleh pegawai sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan status kepegawaian 31 (tiga puluh satu) orang PNS, 1(satu) orang PNS dan 27 (dua puluh tujuh) orang Pegawai Harian Kontrak (PHK) (data per Januari 2013). Adapun para pegawai ada yang ditempatkan di Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan ada pula yang ditempatkan di Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Tabel I
KLASIFIKASI PNS DAN CPNS
KANTOR PERWAKILAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DI JAKARTA
BERDASARKAN TINGKAT ESELON (PER JANUARI 2013)

NO.	ESSELON	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH SELURUHNYA	KETERANGAN
1.	II A	-	-	-	
2.	II B	-	-	-	
3.	III A	1	-	1	
4.	III B	-	-	-	
5.	IV A	1	2	3	
6.	IV B	-	-	-	
7.	Non Esselon	15	13	28	
8.	Fungsional	-	-	-	
	JUMLAH	17	15	32	

Tabel II
KLASIFIKASI PNS DAN CPNS
KANTOR PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DI
JAKARTA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN (PER JANUARI 2013)

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI LAKI-LAKI	JUMLAH PEGAWAI PEREMPUAN	JUMLAH SELURUHNYA
1.	Doktoral / S-3	-	-	-
2.	Pasca Sarjana / S-2	2	-	3
3.	Sarjana / S-1	6	9	15
4.	Diploma -IV	-	-	-
5.	Diploma-III	1	2	3
6.	Diploma -I/II	-	-	-
7.	SLTA	7	3	10
8.	SLTP	-	-	-
9	SD	-	-	-
	JUMLAH	17	15	32

B. Sarana dan Prasarana Gedung Perkantoran

Prasarana gedung Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta saat ini yang berlokasi di Jalan Kedondong Raya Nomor 13 Rawamangun Jakarta Timur belumlah cukup representatif baik dilihat dari bangunan maupun dari segi lansekap atau tata ruang. Hal ini menjadi kendala karena ruang yang ada terlalu sempit dan tidak mencukupi untuk menampung 58 (lima puluh delapan) orang pegawai. Selain itu gedung kantor tersebut berada di lokasi pemukiman penduduk yang juga digunakan sebagai Mess Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga sangat perlu dicari alternatif gedung kantor lain yang lebih representatif dan lebih memenuhi persyaratan sebagai kantor sehingga bila semua itu terpenuhi maka akan semakin meningkatkan fungsi dan tugas pelayanan dari Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan selain itu akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil retribusi jasa usaha sewa kamar. Selain itu Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung di Jakarta juga membawahi Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berada di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta. Dalam hal sarana di Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sudah tersedia cukup memadai dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta antara lain:

No.	Nama	Jumlah	Keterangan
1.	Komputer	7 Unit	
2.	Lap top	5 Unit	
3.	Printer	10 Unit	
4.	Lemari Arsip	3 Unit	
5.	AC	16 Unit	
6.	<i>In focus</i>	1 Unit	
7.	Sofa	6 Set	
8.	Kendaraan dinas roda 4	8 Unit	
9.	Kendaraan dinas roda 2	7 Unit	
10.	Meja Komputer	16 Unit	
12.	Meja Kerja	33 Buah	
13.	Kursi Kerja	24 Buah	
14.	<i>Filing Cabinet</i>	3 Unit	
15.	Mesin Ketik	2 Unit	
16.	Mesin Penghancur Kertas	2 Unit	
17.	Telepon	2 Unit	
18.	Mesin <i>Faximilie</i>	2 Unit	
19.	Tabung Pemadam Kebakaran	5 Unit	
20.	Mesin Fotocopy	2 Unit	
21.	<i>Sound System</i>	1 Unit	
22.	Kamera Digital	2 Unit	
23.	Brankas / <i>Safety Box</i>	1 Unit	
24.	Filling besi / metal	5 Unit	
25.	Televisi	20 Unit	
26.	<i>Fresher</i>	1 Unit	
27.	DVD player	1 Unit	
28.	Tempat tidur kayu (lengkap)	15 Set	
29.	Lemari es	5 Unit	
30.	Kasur busa / matras	41 Set	
31.	Lemari pakaian	11 Unit	
32.	<i>Microphone</i>	5 Unit	
33.	<i>Microphone floor stand</i>	4 Unit	
34.	Parabola	1 Unit	
35.	Kursi lipat	123 Buah	
36.	Dispenser	3 buah	

37.	Kompor gas	2 Buah	
38.	Lemari Hias / pajangan	3 Buah	
39.	<i>White board</i>	1 Buah	
40.	Lemari kaca	3 Buah	
41.	<i>White board electronic</i>	1 Unit	
42.	<i>Vacuum cleaner</i>	1 Buah	
43.	Kaca hias pajangan	1 Buah	
44.	Setrika	2 Buah	

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

Dalam rangka mewujudkan Pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdapat pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 maka Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang merupakan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor merupakan unsur penunjang Pemerintah telah menetapkan sasaran dan target kinerja dengan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kinerja pelayanan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tidak terlepas dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini dapat dilihat dari komponen yang menjadi tolok ukur yaitu :

2.3.1 Meningkatnya Pelayanan Tugas-Tugas Sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

Tugas-tugas pelayanan sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2011 mengalami peningkatan yang berarti dari tahun-tahun sebelumnya. Banyak kegiatan yang diikuti dan difasilitasi oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta baik itu tingkat nasional maupun internasional. Hal ini semakin dapat menunjukkan peran

penting dari Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta walaupun dengan segala keterbatasan wewenang yang dimiliki tetapi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berusaha untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai perwakilan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

2.3.2 Meningkatnya Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Meningkatnya PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak terlepas dari meningkatnya optimalisasi pengumpulan PAD sesuai dengan potensi penerimaan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan memanfaatkan potensi aset daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ada di Kantor Perwakilan, Mess Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) diharapkan akan semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari hasil retribusi jasa yang dilakukan. Dari tahun 2007-2011 pendapatan dari hasil penerimaan retribusi selalu melampaui dari target yang ditetapkan hal ini merupakan suatu prestasi sendiri bagi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2.3.3 Pengelolaan Kantor dan Mess Perwakilan serta Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Kebijakan pengelolaan Kantor dan Mess Perwakilan Provinsi serta Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Implementasinya dapat dilihat bahwa banyak masyarakat asal

daerah Bangka Belitung dan pejabat pemerintah Daerah Bangka Belitung yang dibantu dan difasilitasi sesuai dalam pelaksanaan tugas sebagai perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 – 2012, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta antara lain :

1. Keterbatasan wewenang yang di berikan kepada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ;
2. Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Aparatur yang ada dalam rangka menunjang kegiatan sebagai perwakilan pemerintahan;
3. Belum dipahaminya arti penting Kantor Perwakilan sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di ibukota;
4. Belum optimalnya koordinasi antara SKPD di daerah dengan Kantor Perwakilan;
5. Belum representatifnya Kantor dan Mess Perwakilan Daerah yang ada di Jakarta ;
6. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada pada Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Masih kurangnya partisipasi daerah Kabupaten / Kota dalam berkoordinasi dan mengikuti kegiatan yang di lakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
8. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman akan arti pentingnya Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

9. Masih terbatasnya sarana informasi untuk mempromosikan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Perwakilan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target	Target	Target	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		SPM	IKK	Indikator Lainnya	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Rata-rata jumlah tamu yang datang dan menginap di mess Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta (orang)				168	224	250	275	300	167	275	167	342	350	99.40	122.76	66.8	124.36	116.66
2.	Rata-rata jumlah tamu para pejabat dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berdinasi ke Jakarta (kali)				300	480	500	600	700	350	500	664	729	750	116.66	104.16	132.8	121.5	107.14
3.	Rata-rata jumlah urusan pemerintahan daerah ke instansi pusat yang dibantu dan difasilitasi dalam penyelesaiannya (kali)				25	30	35	40	45	100	105	100	175	180	400	350	285.71	437.5	400
4.	Rata-rata jumlah kegiatan organisasi masyarakat perantauan yang difasilitasi kegiatannya (kali)				20	25	30	35	40	5	6	4	15	18	25	24	13.33	42.85	45
5.	Rata-rata kegiatan pameran dan promosi yang difasilitasi (kali)				7	11	12	14	15	10	8	10	20	20	142.85	72.72	83.33	142.85	133.33
6.	Rata-rata kegiatan pagelaran seni dan budaya yang difasilitasi (kali)				3	5	9	13	17	4	6	10	14	18	133.33	120	111.11	107.69	105.88

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Jakarta

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pendapatan Daerah Asli Daerah																	
Hasil Retribusi Daerah	10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	17.690.000	28.230.000	30.000.000	25.715.000	31.515.000	175. %	188.20 %	150%	102.86 %	105.05 %	0.00%	0.00%
Belanja Daerah																	
Belanja Tidak Langsung	451.093.806	688.628.480	907.946.135	896.066.135	1.804.448.000	243.248.023	477.381.332	613.991.202	765.672.757	1.319.119.528	53.92 %	69.32%	67.62 %	85.45%	73.10 %	0.00%	0.00%
Belanja Langsung	3.173.301.381	7.789.210.025	3.877.940.485	2.862.392.330	2.805.975.250	2.375.420.165	6.040.424.260	3.837.926.438	2.650.436.059	2.729.092.679	74.86 %	77.55%	98.97 %	92.60%	97.26 %	0.00%	0.00%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayan SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

Untuk Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta maka perlu adanya Analisa Lingkungan Strategis. Analisa Lingkungan Strategis menjadi sangat penting untuk mengetahui tantangan dan peluang yang spesifik dan berbagai peringatan awal yang mengingatkan kita akan faktor atau unsur yang akan membahayakan dimasa depan.

Untuk menganalisa lingkungan strategis yang berpengaruh, dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu melalui *SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)*.

Langkah awal dalam analisis *SWOT* adalah memahami apa saja faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang ada melalui proses identifikasi untuk memberikan gambaran faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat tercapainya tujuan .

2.4.1 Analisa Lingkungan Internal (Kekuatan dan Kelemahan)

1. Strengths (Kekuatan)

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif yang memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai tujuannya. Kekuatan-kekuatan yang dimiliki Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yaitu :

1. Adanya Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75 Tahun 2008.
2. Adanya komitmen untuk meningkatkan eselonering Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

3. Adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Adanya dukungan jumlah pegawai yang dimiliki.

2. Weaknesses (Kelemahan)

Kelemahan adalah situasi kurang kemampuan internal yang mengakibatkan organisasi tidak dapat / gagal mencapai sasarannya, selain memiliki kekuatan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta juga memiliki kelemahan yang dapat menjadi penghambat untuk mencapai tujuan kelemahan tersebut yaitu :

1. Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai.
2. Masih kurangnya sumber daya aparatur yang handal.
3. Keterbatasan dana yang ada pada Kantor Perwakilan.
4. Keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Kantor Perwakilan.

TABEL I
Analisa Lingkungan Internal

NO.	KEKUATAN (S)	NO.	KELEMAHAN (W)
1.	Adanya Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 75 Tahun 2008.	1.	Keterbatasan kewenangan yang diberikan kepada Kantor Perwakilan
2.	Adanya komitmen yang kuat untuk peningkatan eselonering Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	2.	Keterbatasan dana yang ada pada Kantor Perwakilan.
3.	Adanya dukungan yang besar dari Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	3.	Kondisi sarana dan prasarana yang belum representatif dan memadai.
4.	Adanya dukungan jumlah pegawai yang dimiliki	4.	Masih kurangnya sumber daya aparatur yang handal

Analisa Lingkungan Eksternal (Peluang dan Tantangan)

1. Opportunity (Peluang)

Adanya perubahan yang terjadi pada sistem pemerintahan yang domestik, pluralistik dan desentralistik secara langsung maupun tidak langsung telah menyebabkan perubahan-perubahan terjadi di pemerintah daerah maupun masyarakat.

Keadaan tersebut memberikan peluang atau kesempatan bagi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk mengembangkan segala upaya demi kemajuan daerah. Peluang atau kesempatan tersebut yaitu :

1. Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat memudahkan dalam mengakses data dan informasi.
2. Adanya peluang untuk mengali obyek retribusi daerah yang baru.
3. Adanya bintek-bintek dan pendidikan dan latihan.
4. Kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat, Lembaga, Media, LSM, Asosiasi dan Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia.

2. Threats (Ancaman)

Selain peluang atau kesempatan yang ada, terdapat pula ancaman-ancaman yang dapat menyebabkan adanya kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan pemerintah.

Ancaman-ancaman yang dihadapi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yaitu :

1. Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Kurangnya koordinasi dengan SKPD dan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas.

3. Kurangnya kesadaran akan arti dan peran penting dari Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
4. Belum adanya Peraturan Daerah yang mendukung peningkatan eselonering Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

TABEL II
Analisa Lingkungan Eksternal

No.	Peluang (O)	No.	Ancaman (T)
1.	Teknologi informasi yang berkembang sangat cepat memudahkan dalam mengakses data dan informasi.	1.	Adanya tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja pemerintah daerah
2.	Adanya peluang untuk menggali obyek retribusi daerah yang baru.	2.	Kurangnya koordinasi dengan SKPD dan Kabupaten / Kota dalam pelaksanaan tugas.
3.	Adanya bintek-bintek dan pendidikan dan latihan	3.	Kurangnya kesadaran akan arti dan peran penting dari Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
4.	Kesempatan melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah Pusat, Lembaga, media, LSM / Asosiasi dan Pimpinan Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota diseluruh Indonesia	4.	Belum adanya Peraturan Daerah yang mendukung peningkatan eselonering Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

Dari hasil analisa SWOT dan dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap keberadaan Kantor Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Perwakilan Bangka Belitung di Jakarta yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Membuat perumusan kebijakan tentang peningkatan eselonering sebagai Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
2. Menyusun pedoman mengenai kegiatan yang akan diadakan pada Anjungan Daerah.
3. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
4. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait.
5. Merencanakan realokasi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ke tempat dan daerah yang lebih representatif, sehingga dapat lebih optimal dalam menjalankan tugas.

Strategi dan kebijakan yang akan pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas-tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Pengembangan Sumber Daya Aparatur (SDA) melalui peningkatan kapabilitas, kompensasi dan kesejahteraan pegawai;
 - b. Peningkatan kemampuan dan kecakapan ;
 - c. Peningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal;
 - d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai efektivitas dan efisien.

2. Strategi Membangun Koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan dalam kepentingan yang berbeda untuk memperoleh hasil yang terbaik untuk kepentingan pemerintah daerah dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka mewujudkan suatu kerjasama yang optimal;
 - b. Melaksanakan hubungan yang terintegrasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya.
3. Strategi Pemberdayaan seluruh potensi yang ada pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam rangka mewujudkan *good governance* dilaksanakan dengan arah kebijakan :
 - a. Meningkatkan kualitas sebagai Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
 - b. Memanfaatkan seluruh potensi yang ada pada Perwakilan Provinsi di Jakarta.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu dan berhubungan dengan pelayanan. Suatu daerah dengan pelayanan pemerintahan yang baik akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Mempunyai pelayanan yang profesional dan bertanggung jawab menjadi tujuan utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung umumnya dan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta khususnya. Isu saat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah, “ *belum optimalnya pelayanan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta* ”. Isu ini berkembang karena adanya beberapa permasalahan strategis yang menjadi perhatian dan harus segera diatasi.

Dengan melihat capaian kinerja yang telah dilaksanakan pada periode 2007-2012 serta tantangan yang semakin berat pada 2012 – 2017, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Masalah yang bersifat internal antara lain :
 - a. Masih belum terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana yang representatif sehingga menyebabkan kurang kondusif dan kurang efektifnya dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Masih belum terpenuhinya Sumber Daya Aparatur yang handal dalam menangani berbagai persoalan yang terkait dengan pelayanan sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
 - c. Masih belum maksimalnya pelaksanaan tugas-tugas internal.
 - d. Masih belum maksimalnya wewenang yang diberikan sebagai Perwakilan.
2. Masalah yang bersifat Eksternal :
 - a. Belum dipahami secara baik tentang arti pentingnya Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
 - b. Masih belum optimalnya koordinasi yang dilakukan oleh setiap SKPD pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan di Jakarta.
 - c. Belum maksimalnya pemanfaatan fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta sebagai

Perwakilan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Prov. Kep. Bangka Belitung periode 2012-2017, Visi Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah, **“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan Berdaya Saing berbasis Potensi Lokal Melalui Pengembangan Sinergitas dan Konektivitas Perkotaan dan Pedesaan”**, sehingga diharapkan seluruh *stakeholder* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Bangka Belitung agar lebih sejahtera.

Penjelasan Visi berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, terdapat 5 (lima) kata kunci yaitu Mandiri, Maju, Berkeadilan Sinergitas dan Konektivitas dan Berdaya Saing.

“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri” mengandung arti bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlandaskan atas kemampuan sendiri masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memungkinkan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang saling menguntungkan.

“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Maju” adalah keinginan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus membangun, berpikir jauh ke depan dan kreatif, bukan hanya setara dengan daerah lain di Indonesia tetapi juga sejajar dengan daerah di negara-negara maju.

“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Berkeadilan” adalah konsep pembangunan yang mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki.

“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Sinergitas dan Konektivitas” adalah sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antar level pemerintahan

“Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdaya saing” adalah kapasitas dan kemampuan berkompetensi yang dihasilkan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menghadapi segala tantangan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Guna mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka telah ditetapkan 5 (lima) Misi dari Gubernur/Wakil Gubernur guna melaksanakan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta terdapat pada misi ke 5 yakni : **“PERWUJUDAN GOOD GOVERNMENT DAN CLEAN GOVERNMENT MELALUI PENCIPTAAN ETOS KERJA DAN KUALITAS PELAYANAN BIROKRASI DENGAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH YANG BERKUALITAS BAGI PELAYANAN MASYARAKAT BANGKA BELITUNG”**.

Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan yaitu : terbentuknya birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan dengan sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya sistem birokrasi pemerintah yang kuat, transparan, akuntabel dan efisien melalui penerapan kebijakan berupa adanya

Kerjasama pengembangan potensi sumber daya daerah dan investasi daerah harus semakin ditingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan para investor baik didalam maupun luar negeri

3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Beberapa permasalahan yang ada saat ini merupakan hal yang sangat mendasar untuk segera diatasi agar tidak menjadi kendala di masa depan yang akan menghambat tercapainya tujuan. Fokus perhatian kepada Sumber Daya Aparatur, sarana dan prasarana maupun sistem yang ada menjadi isu dan permasalahan strategis kedepan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi dibidang pemerintahan umum secara umum, maka isu strategis

yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas umum Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yaitu :

1. Belum representatif dan layaknya Kantor dan Mess Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta;
2. Belum optimalnya kualitas kemampuan Sumber Daya Aparatur ;
3. Masih terbatasnya kewenangan yang diberikan pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ;
4. Masih belum dipahaminya akan arti penting fungsi dan kedudukan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai perwakilan daerah di Jakarta.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum cukup memadai.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

A. Visi

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 150 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka lima tahun merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang pengesahannya berpedoman kepada RPJP Daerah dan dengan memperhatikan RPJM Nasional. Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2012 - 2017 adalah : “ ***Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, berkeadilan dan berdaya saing***

berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan pedesaan”

Berdasarkan rumusan diatas, dan memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005 – 2025 dan RPJMD 2012 -2017, maka Visi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta adalah :

“ Terwujudnya Hubungan yang Efektif dan Efisien Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta “

Pernyataan Visi

Visi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan tujuan dan sasaran Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam membantu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017.

Makna Visi

Arti dan makna dari Visi yang dimaksud adalah :

1. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan pemerintah yang baik (***good government***) agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan kredibilitasnya diakui masyarakat di daerahnya sendiri maupun masyarakat luar sesuai dengan prinsip-prinsip ***good governance*** yaitu akuntabilitas, transparan, efektif dan efisien. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dapat mengelola sumber-sumber daya manusia yang dipercayakannya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2. Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang melaksanakan wewenang untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan antar lembaga, masyarakat dan pelayanan, promosi dan informasi harus profesional dengan efisiensi, efektif, akuntabel dan transparan agar dapat melayani masyarakat sesuai dengan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mendukung terwujudnya visi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJMD yaitu : **“ Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Mandiri, Maju, Berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensi lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan pedesaan . “**

B. Misi

Guna merealisasikan Visi tersebut diatas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Perwakilan Provinsi Bangka Belitung telah menetapkan beberapa misinya yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam RPJMD Tahun 2012-2017 antara lain adalah :

1. Meningkatkan hubungan dan koordinasi serta kerjasama antara Instansi Pemerintah Pusat, Kementerian, Lembaga serta swasta, Perwakilan Negara Sahabat dan Lembaga Internasional, Media, LSM / Asosiasi dan Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten Kota diseluruh Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan sebaliknya.
2. Meningkatkan kapasitas peran dan kewenangan sebagai Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
3. Meningkatkan kualitas dan kemampuan profesionalisme Sumber Daya Aparatur.
4. Meningkatkan pelayanan publik yang berbasis akuntabilitas kinerja efektif dan efisien.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
6. Menyediakan bahan informasi dan promosi potensi pembangunan, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

Pernyataan Misi

Untuk mewujudkan Misi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Jakarta, maka ditetapkan Misi tersebut sebagai peningkatan pelayanan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta secara profesional aspiratif, transparan dan akuntabel guna terwujudnya Misi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam RPJMD Tahun 2012-2017.

Makna Misi

Dari pernyataan misi yang ditetapkan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, maka penjelasan makna misi tersebut yaitu :

1. Dalam rangka mewujudkan suatu keberhasilan hubungan kerja maka sangat diperlukan suatu koordinasi atau kerjasama yang baik untuk membina saling pengertian dan pemahaman untuk mendapatkan suatu hasil kerjasama yang memiliki suatu ketepaduan dan keselarasan untuk mencapai hasil yang optimal dan maksimal antar lembaga-lembaga yang ada dengan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja yang lebih profesional dan handal sebagai perwakilan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta perlu didukung dengan diberikan kewenangan yang lebih memadai.
3. Dalam rangka mewujudkan sumber daya aparatur yang profesional, maka kualitas aparatur perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Dalam menghadapi perkembangan pembangunan yang semakin cepat maka meningkatkan pelayanan yang berbasis akuntabilitas kinerja efektif dan efisien sangat diperlukan sesuai dengan prinsip *good governance* yang efisien, transparan dan akuntabilitas, dalam rangka Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta meningkatkan pertanggungjawaban APBD.
5. Untuk memberikan pelayanan yang lebih prima dan optimal maka selain didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional maka sangat diperlukan juga dukungan sarana dan prasarana yang lebih representatif dan memadai.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang harus diselesaikan oleh suatu SKPD. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi.

Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang diinginkan dimasa mendatang, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut tujuan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Belitung di Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagai perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

2. Sebagai duta dan pintu gerbang Perwakilan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional, berkualitas dan bertanggungjawab
4. Memberikan pelayanan kepada pejabat dan pegawai daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertugas di Jakarta.
5. Merelokasi Kantor Perwakilan dan Mess Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ke tempat yang lebih memadai dan representatif.
6. Mempromosikan potensi daerah, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya kewenangan dan kapasitas peran sebagai Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
2. Meningkatkannya pelayanan publik dan perkantoran yang prima dan optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.
3. Terwujudnya PNS yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab.
4. Terwujudnya pelayanan publik dan perkantoran yang prima dan optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai perwakilan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

5. Meningkatnya sarana dan prasarana gedung Kantor dan Mess daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih memadai dan representatif .
6. Terwujudnya ketersediaan data dan informasi dan promosi mengenai potensi daerah, seni dan budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

TABEL V
MATRIKS VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
Terwujudnya Hubungan Yang Efektif dan Efisien Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta	1.Meningkatkan hubungan dan koordinasi serta kerjasama antara instansi pemerintah pusat, kementerian, lembaga, serta swasta, perwakilan negara sahabat, lembaga internasional, media, LSM/ Asosiasi, dan pimpinan daerah provinsi, kabupaten, kota diseluruh Indonesia dengan Pemerintah Daerah dan sebaliknya.	1.Sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas -tugas perwakilan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta	1. Meningkatnya kewenangan dan kapasitas peran sebagai perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

	2.Meningkatkan kapasitas peran dan kewenangan sebagai perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta	2.Sebagai duta dan gerbang Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta	2. Meningkatkan pelayanan publik dan perkantoran yang prima dan optimal serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dalam tugasnya sebagai Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
	3. Meningkatkan kualitas dan kemampuan profesional Sumber Daya Aparatur	3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang profesional, berkualitas bertanggungjawab	3. Terwujudnya PNS yang profesional berkualitas, dan bertanggung jawab
	4.Meningkatkan Pelayanan Publik yang berbasis akuntabilitas kinerja efektif dan efisien	4. Memberikan pelayanan kepada pejabat dan pegawai daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sedang bertugas di Jakarta.	4.Terwujudnya pelayanan publik dan perkantoran yang prima dan optimal serta efektif dan efisien dalam tugasnya sebagai perwakilan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
	5.Meningkatkan sarana dan prasarana Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta	5. Merelokasi Kantor Perwakilan dan Mess Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ke tempat yang lebih memadai dan representatif.	5.Meningkatnya sarana dan prasarana gedung kantor dan mess daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lebih memadai dan representatif.
	6.Menyediakan	6.Mempromosika	6.Terwujudnya

	bahan informasi dan promosi potensi pembangunan, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang lengkap dan akurat	n Potensi daerah, seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta	ketersediaan data dan informasi serta promosi mengenai potensi daerah, seni dan budaya Provinsi Kepulauan Bangka
--	--	--	--

4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

4.3.1 Strategi

Dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya dan mengacu pada visi serta misi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, maka Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2017 yang terkait dengan SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012 - 2017 adalah “ *Perwujudan good governance dan clean government* “. Berpedoman pada strategi tersebut , maka Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun kedepan merumuskan Strategi sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan pelayanan prima dan optimal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien menuju *good governance*.
- b. Meningkatkan Profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dan studi banding

- c. Meningkatkan peran Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam mempromosikan dan menginformasikan seni budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Meningkatkan tingkat prestasi seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam berbagai kegiatan di ibukota Jakarta.
- e. Meningkatkan efektifitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- I. Kebijakan peningkatan pelayanan prima dan optimal kepada pemerintah daerah dan masyarakat, diprioritaskan pada upaya meliputi :
 - 1. Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Mess Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah ;
 - 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Mess Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah;
 - 3. Kemitraan peningkatan pelayanan pemerintahan hubungan antar lembaga, mess daerah dan promosi dan informasi.

- II. Kebijakan meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur, diprioritaskan pada upaya meliputi :
 1. Mengirimkan Sumber Daya Aparatur untuk mengikuti pendidikan dan latihan, *workshop*, dan studi banding.
- III. Kebijakan peningkatan promosi dan informasi seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tingkat nasional maupun internasional, diprioritaskan pada upaya :
 1. Pengembangan kerjasama dalam mengelola kesenian dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
- IV. Kebijakan peningkatan prestasi seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diprioritaskan pada upaya :
 1. Pengembangan kebijakan dan manajemen kesenian dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
 2. Pembinaan dan mempromosikan kesenian dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;
 3. Peningkatan sarana dan prasarana kesenian dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .
- V. Kebijakan melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang bertanggung jawab, diprioritaskan pada upaya :
 - Membuat laporan triwulan dan laporan akhir tahun yang dilakukan secara periodik.
 - Meningkatkan kualitas laporan keuangan Kantor Perwakilan

TABEL
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

NO.	STRATEGI	KEBIJAKAN
1.	Mengoptimalkan pelayanan prima dan optimal dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien menuju <i>good governance</i> .	Kebijakan peningkatan pelayanan prima dan optimal kepada pemerintah daerah dan masyarakat, diprioritaskan pada upaya meliputi : 1.1. Pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan dan Mess Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Anjungan Daerah Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah 1.2. Pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah 1.3. Kemitraan peningkatan pelayanan pemerintahan Hubungan Antar Lembaga, Promosi dan Informasi dan Mess Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.	Meningkatkan profesionalisme dan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan latihan serta studi banding	Kebijakan peningkatan profesionalisme dan kualitas sumber Daya Aparatur ini, diprioritaskan pada upaya meliputi : 2.1. Mengirimkan Sumber Daya Aparatur untuk mengikuti pendidikan dan latihan, <i>Workshop</i> , serta study banding.
3.	Meningkatkan a peran Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam Mempromosikan dan menginformasikan seni budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta	Kebijakan peningkatan promosi dan informasi seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tingkat nasional maupun internasional, di prioritaskan pada upaya : 3.1. Pengembangan Kerjasama dalam mengelola kesenian

		dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4.	Meningkatkan tingkat prestasi seni dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di berbagai kegiatan di Ibukota Jakarta	<p>Kebijakan Peningkatan Prestasi dan Budaya Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Anjungan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini Indonesia Indah :</p> <p>4.1.Pengembangan Kebijakan dan manajemen kesenian dan budaya daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta</p> <p>4.2.Pembinaan dan Mempromosikan Kesenian dan Budaya Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>4.3.Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
5.	Meningkatkan efektifitas laporan keuangan daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan	<p>Kebijakan melaksanakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang bertanggung jawab, di prioritaskan pada upaya :</p> <p>5.1.Membuat laporan triwulan dan laporan akhir tahun</p> <p>5.2.Meningkatkan kualitas laporan keuangan Kantor</p>

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan yang telah ditetapkan dengan itu Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Prioritas yang menjadi urusan wajib pemerintahan umum Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta pada tahun 2012 - 2017 adalah memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengendalian, hubungan antar lembaga, masyarakat, dan pelayanan.

Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja.

5.1. PROGRAM STRATEGIS

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana Strategis melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan dituangkan dalam bentuk rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program dalam mendukung aktivitas perkantoran Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta, program ini adalah kegiatan yang bersifat operasional dan dilaksanakan oleh seluruh satuan perangkat kerja daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan wajib.

2. Program Peningkatan Sarana dan Sarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan harapan akan memberi dampak / manfaat / hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Program ini adalah dalam rangka pemberian dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang fasilitasi , koordinasi, dan pengendalian hubungan antar lembaga, masyarakat dan pelayanan.

4. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini adalah dalam rangka mengembangkan dan memfasilitasi serta mempromosikan seni dan budaya daerah.

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan dalam rangka untuk peningkatan disiplin aparatur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini secara umum bertujuan untuk peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Aparatur pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta.

7. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan sarana dan prasarana

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini adalah dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya.

5.2 KEGIATAN STRATEGIS

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (Sumber Daya Aparatur), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang / jasa.

Untuk melaksanakan program diatas, maka disusun kegiatan pada Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta tahun 2012 - 2017 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Penyediaan jasa surat menyurat ;
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional ;
- d. Penyediaan jasa administrasi keuangan ;
- e. Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
- f. Penyediaan alat tulis kantor ;

- g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
- h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ;
- i. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
- j. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ;
- k. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ;
- l. Penyediaan bahan logistik kantor ;
- m. Penyediaan makanan dan minuman ;
- n. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
- o. Pengelolaan *Website*;
- p. Penyediaan jasa penunjang pengelola administrasi perkantoran.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini merupakan program generik dengan tujuan meningkatkan kinerja aparatur melalui dukungan sarana dan prasarana kerja.

Indikator kinerja program adalah terpenuhinya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dan terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur dari :

- 1) Persentase penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk kategori fasilitas tertentu.
- 2) Persentase pembangunan sarana dan prasarana Kantor Perwakilan.

Pelaksana program adalah Sub Bagian Tata Usaha melalui Kegiatan Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur. Adapun kegiatan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Pengadaan mobil jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- b. Pengadaan kendaraan dinas operasional ;
- c. Pengadaan peralatan gedung kantor ;
- d. Pengadaan meubelair ;
- e. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor ;
- f. Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor ;
- g. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor ;

h. Pengadaan sarana kendaraan dinas operasional;

3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Kantor Perwakilan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi sosial dan masyarakat ;
- b. Seminar Peran serta Kantor Perwakilan di Jakarta dalam Perspektif tugas dan fungsi ;
- c. Dialog / audiensi dengan mahasiswa Bangka Belitung di Bandung;
- d. Dialog / audiensi dengan mahasiswa Bangka Belitung di Yogyakarta;
- e. Dialog / audiensi dengan mahasiswa Bangka Belitung di Jabotabek;
- f. Dialog / audiensi Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi, Bupati, Walikota, Ketua DPRD Kabupaten / Kota bersama DPR / DPD RI dalam rangka menjalankan misi pembangunan Bangka Belitung ;
- g. Pengadaan cinderamata .

4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan Kantor Perwakilan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Pameran budaya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Pagelaran Kesenian dan budaya Bangka Belitung;
- c. Pelatihan Sanggar Tari Seni dan Budaya di anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Keikutsertaan Pameran Produk khas daerah ;
- e. Pawai Keprajuritan ;
- f. Pengadaan Barang-barang bercorak kebudayaan ;
- g. Pagelaran Seni Drama Tari Bangka Belitung ;
- h. Parade Kesenian dan budaya Daerah.

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan Kantor Perwakilan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya ;
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu ;
- c. Pengadaan Mesin Absensi Pegawai

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan Kantor Perwakilan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Bimbingan Teknis Keprotokolan ;
- b. Training Motivasi dan Keagamaan bagi aparatur.

7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan Kantor Perwakilan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
- b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
- c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran;
- d. Penyusunan pelaporan akhir tahun;
- e. Penyusunan Rencana Strategik dan Rencanan Kerja Tahunan;
- f. Penyusunan perencanaan penganggaran responsif gender.

8. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Kegiatan Kantor Perwakilan yang terkait pelaksanaan program ini antara lain :

- a. Pengadaan tanah untuk lokasi kantor / mess;
- b. Pengadaan sertifikat tanah.

5.3. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

Pendanaan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan dari setiap program / kegiatan. Sedangkan untuk kelompok sasaran utama yang menjadi obyek perencanaan pembangunan diantaranya adalah aparatur dan program / kegiatan pembangunan daerah.

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan untuk pelaksanaan dari setiap program / kegiatan merupakan pagu indikatif yang diperkirakan dibutuhkan untuk menjalankan setiap kegiatan pertahun dengan melihat besaran dan kondisi ketersediaan anggaran daerah.

Rincian program, kegiatan indikator serta pendanaan indikatif Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012- 2017 adalah sebagaimana terlampir. Untuk mengukur tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu adanya indikator kinerja dari setiap sasaran strategis serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebagai indikator kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam mewujudkan sasaran strategis serta program/kegiatan yang direncanakan, maka telah ditetapkan indikator dari masing-masing sasaran strategis serta pendanaan indikatif dari masing-masing kegiatan untuk lima tahun mendatang terlihat pada Tabel di lampiran

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial ekonomi dan kemampuan

masyarakat oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana kegiatan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Memperhatikan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan maka indikator kinerja pada Kantor Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang mengacu pada RPJM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adapun indikator Kinerja SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tabel lampiran.

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ini merupakan implementasi dari regulasi dan kerangka kebijakan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun rencana kerja Kantor Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang berpedoman berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017. Hasil pelaksanaan dari Renstra Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012 – 2017 akan menjadi tolok ukur keberhasilan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dalam pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolok ukur ini akan terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada setiap akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan baik pada tingkat *output*, *outcome* maupun pada tingkat *benefit*.

Rencana Strategis Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta ini pada hakekatnya untuk keselarasan dan kesinambungan perencanaan program jangka menengah periode 2010-2015 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2017. Oleh karena itu diharapkan Renstra Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan di Jakarta ini dapat di jalankan

sesuai dengan rencana dengan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum.